



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM**

Nomor : W24.HM.05.04- 336

Nomor : 100.3.7/357/BAG.HUKUM

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-02-2026)** kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. RAKHMAT RENALDY : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor : M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ERWIN BURASE : Bupati Parigi Moutong berkedudukan di jalan Kampali No. 1 Kampal, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-2301 tanggal 22 Mei 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-20230 Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Page 1 of 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah.....dst
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Pembentukan Daerah ...;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

Page 2 of 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pembinaan dan peningkatan Kesadaran Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah.

Page 3 of 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien tentang pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pembinaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten ...

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di Wilayah Parigi Moutong.

Pasal 4
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini yaitu pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. peningkatan kesadaran hukum melalui :
 1. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
 2. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- b. pelaksanaan kerja sama melalui :
 1. pengkajian dan penelitian hukum;
 2. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 3. pembentukan produk hukum daerah.
- c. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
- d. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui :
 1. pertukaran data dan informasi; dan
 2. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Dalam Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:

- 1). **PIHAK KESATU** Mempunyai Tugas dan Tanggung jawab :

Page 4 of 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a) melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- b) fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- c) melaksanakan pengkajian dan penelitian hukum;
- d) fasilitasi pembentukan produk hukum daerah; dan/atau
- e) fasilitasi kekayaan intelektual.

2).PIHAK KEDUA Mempunyai Tugas dan Tanggungjawab :

- a) fasilitasi pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- b) fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- c) fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan penelitian hukum;
- d) pembentukan produk hukum daerah; dan/atau
- e) fasilitasi kekayaan intelektual;

**Pasal 7
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.

**Pasal 9
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan bersama-sama dan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam Amandemen dan/atau Adendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Amandemen dan/atau Adendum Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

(2) **a. PIHAK KESATU**

Narahubung : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat : Jalan Dewi Sartika No 23 Palu
Telepon : 0451482353
Surel : kanwilsulteng@kemenkumham.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : KEPALA BAGIAN HUKUM
Alamat :
Telepon : 0811867101
Surel :

- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Page 6 of 7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Palu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU



RAKHMAT RENALDY

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA